

FENOMENA GOLPUT MASYARAKAT PERKOTAAN (Studi Kasus Pilkada Kota Surabaya 2020)

Edward Melio Bertho¹⁾, M. Zainuddin Lutfi Fauzi²⁾, Vivi Friskila³⁾

1)Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

2)Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

3)Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

Abstrak

Pemilihan Kepala daerah adalah cara paling demokratis untuk memilih calon kepala daerah yang akan menduduki jabatan di sebuah kota atau Provinsi, hal ini harus mendapat dukungan mayoritas suara untuk ditentukan sebagai pemenang dalam kontestasi politik yang berlangsung 5 tahunan tersebut. Namun Fenomena Golput masih menjadi masalah bagi banyak daerah dalam proses pemilihan umum. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi berbagai kelompok yang berkepentingan dengan hasil Pemilu tersebut. Tidak terkecuali yang terjadi di Kota Metropolitan Surabaya, kota yang ditunjang dengan berbagai fasilitas dan kemajuan diberbagai bidang tersebut masih terdapat Golput yang sangat tinggi yang terjadi dalam Pemilu kepala daerah. Sebanyak 40% masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam proses Pemilukada tahun 2020 tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menarik kesimpulan terhadap hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yang sudah dipilih sesuai dengan kriteria tertentu. Untuk teknik pemilihan informan menggunakan tekni snowball dikarenakan masih tertutupnya masyarakat yang bersedia untuk diwawancara sehingga dengan teknik *snowball* tersebut didapatkan petunjuk dari informan yang sudah diwawancarai untuk mewawancara informan selanjutnya sampai hasil wawancara dianggap jenuh. Terdapat beberapa alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada Surabaya tahun 2020 yakni masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan pemilu kada sehingga masyarakat tidak tertarik untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya adalah masyarakat kecewa dengan hasil pemilukada yang pernah berlangsung dan dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat dan masyarakat menganggap Golput adalah pilihan paling rasional dan masuk akal ketika mengaggap calon yang maju dalam pemilukada tidak ada yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Kata Kunci: Golput; Pemilukada; Pilihan Rasional.

PENDAHULUAN

Proses pemilihan presiden 2004 adalah salah satu momentum yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, banyak masyarakat yang berharap presiden yang terpilih adalah presiden yang mereka dukung dan bisa memberikan perubahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam kehidupan masyarakat. Proses pemilihan Presiden secara langsung oleh masyarakat dilakukan pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia. Ini adalah momentum demokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah pasca runtuhnya orde baru. Pemilihan yang dilakukan langsung oleh masyarakat ini menggantikan sistem pemilu perwakilan yang sebelumnya dilakukan di Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Tentu ini menjadi angin segar dalam sistem demokrasi di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang memfokuskan perhatian dalam kegiatan 5 tahun sekali tersebut. Pemilu presiden menjadi topik perbincangan ditengah masyarakat. Karena banyak harapan yang digantungkan kepada masing-masing calon presiden jika terpilih nanti. Memang masyarakat tidak memiliki fungsi dalam menjalankan jalannya pemerintahan, namun masyarakat memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang menjalankan fungsi pemerintahan (Budiarjo, 1981).

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sudah merubah struktur masyarakat, penyebaran informasi bahkan sudah bisa dikonsumsi masyarakat sampai di tingkatan pedesaan, hal ini justru menambah pengetahuan masyarakat tentang politik. Tidak jarang kita menemukan pembahasan tentang politik yang dilakukan oleh masyarakat di semua ruang publik yang bisa diakses, baik itu di tempat kerja, atau saat berkumpul dengan tetangga dan keluarga. Masifnya pemberitaan tentang pemilu presiden di media elektronik maupun media sosial menambah semaraknya kegiatan dalam proses pemilu, masyarakat dapat menambah pengetahuan dan informasi terkait calon presiden yang bertarung dalam pemilu presiden. Tidak jarang juga dibumbui dengan perdebatan yang terjadi diantara masyarakat terkait dengan program kerja dan visi misi calon presiden.

Momentum pilpres juga banyak mendapat perhatian masyarakat, banyak diskusi yang dilakukan oleh masyarakat ditingkatan akar rumput, seperti di warung kopi, tempat kerja dan lain sebagainya. Ini tidak terlepas dari usaha beberapa pihak yang

mengupayakan supaya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu mencapai presentase tertinggi. Tingkat penggunaan suara dalam pilpres secara nasional mencapai angka yang tinggi yaitu sebesar 81,97% ini menunjukkan *antusiasme* masyarakat dalam pemilu cukup besar.

Penyelenggaraan Pemilukada langsung dimulai tahun 2004 adalah bagian dari proses demokratisasi, khususnya ditingkatan lokal, ini digunakan untuk menggantikan proses pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dianggap hanya mewakili kepentingan partai (Upe, 2008). Banyak harapan yang di cita-citakan oleh masyarakat sehingga masyarakat cukup antusias dalam mengikuti proses pemilu yang dilakukan oleh pemerintah, selain itu tingginya angka partisipasi politik masyarakat juga usaha yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang berkepentingan dengan pemilu tersebut, seperti partai politik, Komisi pemilihan umum (KPU), Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), media dan jurnalis serta banyak lagi pihak yang mempunyai andil besar dalam meningkatnya angka partisipasi politik di angka yang tinggi tersebut. Bahkan di beberapa daerah relasi antara agama dan Politik menjadi salah satu alasan tingginya angka partisipasi politik masyarakat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Agus Saputro menjelaskan bahwa tokoh masyarakat mempunyai peran yang cukup tinggi dalam mensosialisasikan pemilu kepada *stakeholdernya*. Ini menunjukkan bahwa korelasi agama dan politik masih cukup kuat di beberapa daerah (Saputro, 2018).

Namun yang masih menjadi kendala adalah jumlah pemilih Golput yang juga masih cukup tinggi di sebagian daerah, salah satunya adalah di kota Surabaya. Kota terbesar kedua di Indonesia tersebut masih menyumbang angka golput yang cukup tinggi dalam pemilu. Angka kehadiran masyarakat dalam pemungutan suara cukup rendah. Hanya sekitar 50-60 % masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada kota Surabaya, hal ini menjadi sesuatu yang sangat mengecewakan mengingat masyarakat di Surabaya adalah masyarakat yang modern dan ditunjang dengan berbagai sarana prasarana yang cukup memadai. Serta dengan tingkat pendidikan masyarakat Surabaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur, hal ini tidak lantas membuat angka partisipasi politik masyarakat menjadi

tinggi. Sehingga angka golput yang tinggi tersebut menjadi pertanyaan yang perlu untuk dilakukan penelitian lebih mendalam.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini akan di komparasikan dengan berbagai penelitian dan buku yang sudah terbit, adapun buku dan karya ilmiah tersebut adalah Buku Karya Sulistiyanto Priyambudi yang berjudul **“Politik Golput di Indonesia Kasus Peristiwa Yogya”** yang terbit tahun 1994. Golput muncul pada awal tahun 1970-an, sebagai reaksi terhadap segala kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat menjelang pemilu tahun 1971. Para pelopor golput adalah para aktivis angkatan 66 diantaranya Arief Budiman, Marsilam Simanjuntak, Julius Usman, Imam Waluyo, dan juga Adnan Buyung Nasution. Yang kemudia gerakan ini mendapatkan dukungan dari berbagai daerah seperti Bogor, Bandung, Yogyakarta, semarang serta Solo (Sulistiyanto, 1994). Dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan Golput dalam pemilu adalah hal yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Dalam masyarakat modern, Golput adalah sesuatu yang sering dilakukan ketika tidak setuju dengan calon yang maju dalam kontestasi Politik di sebuah daerah. Hal ini seolah adalah bagian dari sikap dan pilihan politik masyarakat sebagai bentuk kekecewaan terhadap system politik yang berlangsung di sebuah daerah.

Selanjutnya penelitan yang dilakukan oleh Agus Saputro yang berjudul **“Agama dan Negara: Politik Identitas menuju Pilpres 2019”** yang diterbitkan dalam Jurnal Asketik oleh IAIN Kediri. dimana dalam penelitian tersebut terdapat kesimpulan bahwa sudah banyak usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menaikkan tingkat partisipasi politik masyarakat. Salah satunya adalah Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tanggal 25 januari 2009 yang mengharamkan kegiatan Golput, dikarenakan memilih pemimpin adalah sebuah keharusan didalam agama islam. Tentu saja hal ini sebagai upaya yang bias dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka Golput yang terjadi di masyarakat. Pemahaman Politik oleh masyarakat selama ini adalah pemahaman politik secara negatif yakni politik adalah kegiatan seputar mendapatkan kekuasaan dengan berbagai cara, kemudian politik selalu berkorelasi dengan korupsi,

kolusi dan nepotisme. Sehingga dengan maraknya pemberitaan negatif yang disebarakan oleh media tentang politik membuat citra politik di masyarakat menjadi negatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni dengan menjelaskan kejadian yang dialami oleh subjek penelitian mengenai alasan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu (Bungin, 2012). Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara (*indepth interview*) mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (*Guide Interview*) yang sudah disiapkan oleh peneliti dan dilakukan transkrip untuk mendapatkan jawaban dalam rumusan masalah. Metode pemilihan informan dilakukan dengan metode *snowball* karena tidak banyak masyarakat yang ingin menunjukkan identitas mereka sehingga dilakukan metode ini karena efektif untuk mengarahkan petunjuk untuk mewawancarai informan selanjutnya. Serta metode pengolahan data menggunakan metode *triangulasi* (Setiawan, F dan Rhama, 2021), yaitu melakukan kroscek antara data yang didapat dari hasil *interview* dengan data yang didapat dari observasi dan dilakukan penarikan kesimpulan sehingga didapatkan hasil yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah pemilihan presiden dan wakil presiden langsung dimulai dari amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga pada tahun 2001. Pasal 6A Ayat (1) UUD menyebutkan, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya, 31 Juli 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil. Hal ini menjadi tonggak bersejarah bagi perpolitikan di Indonesia dimana masyarakat bisa memilih langsung pemimpin yang mereka inginkan tanpa diwakili oleh legislatif.

Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilu adalah tujuan dari semua proses yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pemilu, hal ini adalah hasil akhir yang menunjukkan apakah proses pemilu tersebut berhasil atau ada yang perlu diperbaiki. Tentu dengan tingginya angka Golput yang dilakukan oleh masyarakat hal ini

menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam merangsang *antusiasme* masyarakat untuk menggunakan suaranya dalam Pilkada di Kota Surabaya. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi tingginya angka Golput yang terjadi dikota surabaya dalam Pilkada tahun 2020 tersebut.

PEMAHAMAN MASYARAKAT YANG RENDAH TENTANG POLITIK

Rendahnya aprtisipasi politik masyarakat dalam pemilu tidak lepas dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang pemilu. Secara harfiah politik adalah cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mencari solusi dalam tercapainya kepentingan bersama (Pilipus, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa solusi terbaik untuk mencapai keputusan bersama bisa dilakukan dengan cara politik. Masyarakat tidak boleh apatis dengan politik, karena masyarakat sehar-hari selalu bersentuhan dengan politik. Namun pemahaman yang keliru tentang politik membuat masyarakat menjadi antipasti dengan politik. Hal ini banyak terjadi pada masyarakat akar rumput. Dikarenakan ketidakpedulian dan ketidak ingintahuan masyakat mengenai latar belakang calon kepala daerah membuat informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi minim dan hal ini membuat ketertarikan masyarakat untuk memilih pasangan calon kepala daerah juga menurun.

Menurut salah satu informan yang di wawancara, kehidupan politik tidak banyak berdsmpak secara langsung dengan kehidupan mereka, siapapun yang terpilih tidak banyak dampak bagi kehidupan dan mata pencaharian mereka di akar rumput. Bahkan dihari pemungutan suara banyak dari masyarakat yang bekerja di sektor informal memilih untuk bekerja dari pada menggunakan hak pilih mereka di TPS dan ini adalah pilihan rasional yang dilakukan oleh masyarakat yaitu memilih sesuatu setelah memikirkan dan menimbang tujuan akhirnya (Wirawan, 2012). Sehingga jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada Surabaya menjadi rendah.

Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap proses Pemilukada adalah sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Hal ini juga berdampak pada rendahnya antusias masyarakat untuk terlibat kampanye politik yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon yang maju dalam pilkada kota Surabaya, selain

itu masyarakat juga menganggap banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang di setiap sudut kota Surabaya tidak menarik perhatian masyarakat Sehingga kesadaran untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu juga berkurang.

MASYARAKAT DIKECAWAKAN OLEH PEMIMPIN POLITIK

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik masyarakat masih rendah. Alasan tersebut dijelaskan oleh informan yang diwawancarai, informan tersebut mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tertarik dengan politik dikarenakan pemahaman mereka tentang politik adalah sesuatu yang mengecewakan. Banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang ditayangkan di media membuat masyarakat menjadi apatis.

Masyarakat beranggapan bahwa Politik hanya menguntungkan sebagian kelompok, banyak harapan masyarakat yang dikecewakan oleh tokoh-tokoh politik yang selama ini dianggap mampu membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, namun tidak sedikit mereka yang terpilih justru terjerat kasus Korupsi, hal ini justru membuat kekecewaan masyarakat cukup tinggi. Dikarenakan banyak tokoh yang rela datang ke lokasi-lokasi yang dianggap bisa mendapatkan suara yang banyak, namun setelah terpilih tidak peduli dengan masyarakat yang ada di lokasi tempat tinggal informan. Ditambah lagi tokoh-tokoh politik yang terjerat kasus *criminal* tersebut adalah tokoh yang cukup paham dengan ilmu agama. Hal ini semakin menambah rasa kekecewaan masyarakat yang ada dikalangan akar rumput. Sehingga masyarakat menilai Golput adalah solusi terbaik yang bisa dilakukan.

GOLPUT ADALAH PILIHAN TERBAIK

Masyarakat yang rasional menganggap golput adalah pilihan yang tepat setelah menimbang berbagai aspek. Hal ini seperti yang diungkapkan James Coleman bahwa tindakan seseorang mengarah ke dalam satu tujuan itu ditentukan oleh tujuan dan nilai (Ritzer, 2011). Informan yang peneliti wawancara juga menganggap bahwa keputusan untuk tidak menggunakan hak pilih adalah keputusan yang paling masuk akal. Pilihan ini adalah pilihan terbaik diantara keputusan terburuk. Dengan banyaknya kasus

criminal yang dilakukan oleh kepala daerah mereka beranggapan masyarakat juga akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang yang sudah mereka pilih dalam pemilu tersebut. Sama halnya dengan mereka memberi kesempatan untuk orang yang salah dalam melakukan berbagai kesalahan ketika menjabat. Tentu hal ini sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipikirkan. Bahkan bagi masyarakat yang mempunyai pengetahuan cukup tinggi mengenai politik yang dilakukan dikota Surabaya.

Karena hal ini dipengaruhi oleh berbagai kabar negatif yang dilakukan oleh kepala daerah diberbagai tempat dengan kriminalitas yang berbeda-beda, mulai dari korupsi, gartifikasi, nepotisme hingga perselingkuhan yang dilakukan oleh para pemimpin daerah tersebut. Sehingga keputusan masyarakat untuk tidak terlibat dalam proses pemilu sudah dianggap pilihan paling rasional dengan berbagai pertimbangan tersebut.

Tentu hal ini tidak terlepas dari peran media yang selalu memberikan informasi negatif tentang perpolitikan yang ada di Indonesia. Dan ini menjadi catatan penting bahwa keputusan masyarakat dalam mengikuti proses pemilihan umum juga banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media di berbagai *platform*. Perlu diingat bahwa perkembangan teknologi yang begitu *massif* bahkan sampai golongan akar rumput bisa mengakses dunia informasi dimana saja dan kapan saja juga menjadi faktor tingginya angka masyarakat yang tidak menggunakan suara dalam pemilihan umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini didapatkan beberapa alasan yang mempengaruhi rendahnya angka partisipasi politik masyarakat dalam pemilu kota Surabaya tahun 2020. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam proses berpolitik di kota Surabaya sehingga membuat masyarakat tidak peduli dengan proses pemilu yang dilaksanakan sehingga berdampak pada rendahnya *antusias* masyarakat mengikuti kegiatan dalam pemilu. Selain itu alasan lain adalah kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemimpin politik yang terpilih tidak banyak

berdampak dalam kehidupan masyarakat secara langsung, hal ini membuat masyarakat tidak terlalu *antusias* dalam menggunakan hak pilih dalam pilkada kota Surabaya.

REFERENSI

- Budiarjo, M. (1981). *Demokrasi di Indonesia, demokrasi Parlementer dan demokrasi pancasila*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Pilipus. (2004). *Sosiologi dan Politik (membumikan pemahaman politik untuk masyarakat)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, G. (2011). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenada Media Grup.
- Saputro, A. (2018). Agama dan Negara : Politik Identitas Menuju Pilpres 2019. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 2(2), 111–120. <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/1074>
- Setiawan, F dan Rhama, B. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Mediansosian*, 7(1), 14–28.
- Sulistiyanto, P. (1994). *Politik Golput di Indonesia Kasus Peristiwa Yogya*. Lekhat.
- Upe, A. (2008). *Sosiologi Politik Kontemporer (Kajian tentang Rasionalitas perilaku pemilih di Era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung)*. Prestasi Pustaka.
- Wirawan, I. B. (2012). *Teori- Teori Sosial dalam tiga paradigm Fakta sosial, defines sosial dan perlaku sosial*. Prenada Media Grup.